

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk suatu negara yang sedang berkembang, oleh sebab itu banyak negara yang maju dikarenakan mempunyai mutu pendidikan yang baik. Dengan mutu pendidikan yang baik, maka peluangnya sangat besar untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas dipastikan akan mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap bangsanya. Pemerintah Indonesia juga selalu berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan mutunya dalam bidang pendidikan. Salah satu upaya pemerintah dengan sasaran pembangunan manusia adalah dengan melalui program pendidikan yang dapat memberikan akses dan pemerataan perolehan pendidikan bagi masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, sehingga anak usia produktif untuk sekolah tidak putus sekolah ataupun tidak sekolah (Hasanah & Jabar, 2017). Jadi, apabila sebuah negara mempunyai sistem pendidikan yang baik, maka akan besar peluangnya untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Perlu diketahui bahwa mutu sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu modal utama dalam pembangunan nasional.

Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, seperti yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Hidayat (2013) Pendidikan yang bermutu akan diperoleh pada sekolah yang bermutu, dan sekolah yang bermutu akan menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu pula. Jadi pemerintah turut berperan dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, hal ini bertujuan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang diharapkan mempunyai kontribusi dalam pembangunan bangsa. Salah satu upaya pemerintah dalam mengembangkan pendidikan, adalah dengan

Irza Adya Sugardha, 2018

MANAJEMEN STRATEGIS WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mencanangkan wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan 1994, program diharapkan dapat tuntas pada tahun 2003/2004. Namun, karena adanya krisis ekonomi yang melanda Bangsa Indonesia sejak tahun 1997 menyebabkan target tersebut tidak dapat tercapai. Target penuntasan Wajar akhirnya disesuaikan dari 2003/2004 menjadi 2008/2009. Jadi wajib belajar merupakan program yang wajib dilaksanakan apabila negara kita ingin menghasilkan SDM yang berkualitas lebih banyak lagi.

Menurut Seel (2012, hlm.697) mengatakan bahwa *“compulsory education refers to the most crucial period of formal education required by law of all children between certain ages in a given country”*. Seel menyatakan bahwa pendidikan wajib merupakan periode paling penting dari pendidikan formal yang diwajibkan oleh hukum dari setiap negara, pendidikan wajib diberikan kepada semua anak usia tertentu berdasarkan undang-undang negara tersebut. Jadi menurutnya negara harus turut serta mengatur kebijakan pendidikan di negaranya termasuk untuk mewajibkan setiap penduduknya agar turut serta mengikuti pendidikan sesuai dengan usianya.

Sedangkan, menurut Jin & Zhang (2008, hlm.1008) *“compulsory education is the fundamental education for citizens and is the source of state power, which radically determines thought level, political awareness, cultural sense and production ability of the entire nation”*. Maksudnya bahwa wajib belajar merupakan pendidikan fundamental untuk masyarakat dan merupakan sumber dari kekuatan negara yang secara radikal ditentukan melalui tingkatan kesadaran, politik, budaya dan kemampuan produksi dari seluruh bangsa.

Seiring dengan berjalannya waktu, beberapa negara telah mencanangkan wajib belajar 12 tahun, hal ini dikarenakan akan kesadaran yang sangat tinggi tentang pentingnya pendidikan dalam membangun bangsa. Tapi, sayangnya di Indonesia belum ada payung hukum yang kuat mengenai pelaksanaan wajib belajar 12 tahun yang kuat, maka dari itu pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan yang mengikat, agar disemua daerah serentak mencanangkan wajib belajar 12 tahun, seperti program sebelumnya, yaitu wajar dikdas 9 tahun. Tentunya hal ini bisa dimengerti terkait belum adanya dasar hukum yang kuat mengenai pelaksanaan wajar 12 tahun, karena masih banyak daerah yang belum siap untuk melaksanakan wajib

belajar 12 tahun yang di karenakan program sebelumnya yaitu wajib belajar 9 tahun juga masih juga belum sepenuhnya tercapai.

Tentunya keberhasilan wajar dikdas 9 tahun memiliki kesinambungan dengan penyelenggaraan program wajar 12 tahun. Namun, seperti yang dijelaskan sebelumnya program tersebut belum dapat dilaksanakan karena belum memiliki dasar hukum yang kuat. Oleh sebab itu, Kemendikbud menetapkan program PMU sebagai kebijakan “rintisan” wajar 12 tahun yang sifatnya “anjaran” yang sangat diharapkan untuk dilaksanakan (*sunnah muakadah*) (Subijanto dkk, 2017).

Untuk mngetasi hal tersebut pemerintah menerbitkan Permendikbud no 19 tahun 2016 tentang program Indonesia pintar yang berisi tentang pemerintah yang mendukung pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun. Ternyata sebelum adanya kebijakan ini , sudah ditemukan daerah yang mencanagkan wajib belajar 12 tahun, yaitu di Provinsi Bali , yang kebijakannya tercantum dalam RPJMD 2008-2013 dan juga di Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur.

Dalam pencapaian wajib belajar 12 tahun, tentunya terdapat indikator dalam pencapaiannya, salah satunya adalah kita dapat melihat dari APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) disuatu daerah. Angka partisipasi kasar adalah perbandingan antara jumlah siswa (tanpa mempedulikan umurnya) dengan jumlah penduduk usia sekolah jenjang tertentu (Berlian, 2011). Sedangkan Angka partisipasi murni (APM), yaitu persentase jumlah murid pada usia sekolah tertentu terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada satuan pendidikan yang bersangkutan (Firmansyah & Sumarno, 2013). Jadi, ketika daerah tersebut APK dan APM SD, SMP, dan SMA telah mencapai 100 persen, maka daerahnya bisa dikatakan telah mencapai wajib belakat pendidikan dasar 12 tahun. Kemudian, selain dapat dilihat dari APK nya, ketuntasan wjib belajar 12 tahun juga bisa dilihat dari IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dalam dimensi rata-rata lama sekolah, jadi apabila disuatu daerah telah mencapai rata-rata lama sekolah sekitar 12 tahun, maka daerah tersebut sudah bisa dikatakan telah mencapai wajib belajar 12 Tahun.

Dibawah ini kita dapat melihat APK (Angka Partisipasi Kasar) Penduduk Indonesia dari 34 Provinsi di tahun 2015, 2016 dan 2017.

Tabel 1.1. APK (Angka Partisipasi Kasar) Nasional Berdasar Provinsi Tahun 2015- 2017

Provinsi	2015			2016			2017		
	Angka Partisipasi Kasar (A P K)			Angka Partisipasi Kasar (A P K)			Angka Partisipasi Kasar (A P K)		
	SD/M/ Paket A	SMP/M ts/Pake t B	SM/SM K/MA/ Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/ Mts/P aket B	SM/S MK/M A/Pak et C	SD/MI/ Paket A	SMP/ Mts/P aket B	SM/S MK/M A/Pak et C
ACEH	113.36	97.88	83.33	111.26	99.15	87.47	110.31	98.74	87.52
SUMATERA UTARA	112.62	95.41	84.14	110.89	90.71	93.25	109.5	90.74	93.64
SUMATERA BARAT	113.25	90.94	81.42	110.39	91.05	84.7	110.46	90.4	88.39
RIAU	110.4	94.14	76.16	110.04	93.84	78.3	108.3	92.4	85.05
JAMBI	111.99	91.78	76.12	112.97	90.75	80.36	112.4	86.37	83.54
SUMATERA SELATAN	114.47	93.56	73.18	114.33	88.54	82.51	112.14	89.09	83.44
BENGKULU	116.16	88.79	82.79	113.13	90.38	83.56	112.71	90.52	87.1
LAMPUNG	113.38	100.83	73.9	111.44	93.58	82.98	109.77	91.04	85.16
KEP. BANGKA BELITUNG	111.07	87.6	76.41	111.75	84.38	79.1	110.58	84.53	82.88
KEP. RIAU	108.27	92.38	93.2	108.86	90.4	89.47	106.82	90.45	95.79
DKI JAKARTA	105.26	88.35	76.35	104.32	90.89	73.09	103.37	93.88	79.51
JAWA BARAT	109.42	90.07	70.23	108.09	89.58	70.56	107.54	88.8	76.48
JAWA TENGAH	110.36	91.4	82.15	109.46	89.96	86.27	108.44	91.09	84.35
DI YOGYAKARTA	106.69	97.88	82.64	106.75	93.15	91.87	106.29	94.77	93.38
JAWA TIMUR	108.64	91.13	80.02	108.17	92.54	81.23	106.79	92.22	81.43
BANTEN	112.07	92.27	69.76	109.05	92.17	71.65	109.56	91.14	75.89
BALI	105	96.82	86.61	104.97	96.19	86.41	104.35	96.29	90.04
NUSA TENGGARA BARAT	111.54	91.94	89.51	110.78	93.4	91.25	109.63	94.97	93.89
NUSA TENGGARA TIMUR	116.46	88.96	75.54	114.12	89.56	79.34	114.05	91.35	78.83
KALIMANTAN BARAT	114.82	82.3	81.88	113.75	79.79	87	115.05	81.2	82.48

Irza Adya Sugardha, 2018

MANAJEMEN STRATEGIS WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

KALIMANTAN TENGAH	114.76	95.94	70.7	114.01	86.3	78.44	112.48	87.3	80.38
KALIMANTAN SELATAN	111.14	82.81	73.88	111.63	85.78	76.88	110.3	85.7	77.44
KALIMANTAN TIMUR	112.61	97.9	90.31	110.04	95.28	95.38	108.07	91.46	99.51
KALIMANTAN UTARA	101.66	100.48	83.77	103.96	96.6	89.85	103.86	98.12	87.68
SULAWESI UTARA	111.23	91.06	86.3	110.26	89.5	86.32	108.74	88.52	91.73
SULAWESI TENGAH	107.28	90.73	82.87	105.78	89.48	83.45	104.19	91.86	84.85
SULAWESI SELATAN	111.33	85.56	78.03	109.71	83.38	83.66	109.63	83.97	83.14
SULAWESI TENGGARA	111.56	87.39	81.39	109.96	86.7	81.81	112.1	88.06	80.01
GORONTALO	110.58	81.87	86.74	108.34	83.71	88.67	111.3	81.7	80.89
SULAWESI BARAT	105.92	80.25	84.98	106.23	81	83.49	110.19	83.02	80.34
MALUKU	112.99	88.92	95.13	110.3	90.61	92.12	112.07	94.99	89.71
MALUKU UTARA	115.41	93.9	84.61	113.7	89.13	83.67	113.14	87.05	91.56
PAPUA BARAT	113.46	90.33	89	111.49	92.44	89.59	110.21	90.96	89.69
PAPUA	95.15	73.59	66.97	94.74	72.07	66.85	92.94	82.2	67.94
INDONESIA	110.5	91.17	78.02	109.31	90.12	80.89	108.5	90.23	82.84

(Sumber: Badan Pusat Statistik Pusat Tahun 2015-2017)

Pada tabel 1.1 dijelaskan bahwa APK Indonesia dari 34 provinsi di tahun 2015 dan 2016, kita dapat menyimpulkan APK SD mengalami penurunan, dari 110,5 menjadi 109.31, kemudian APK SLTP juga mengalami penurunan dari 91,17 menjadi 90,12, dan pada APK SMA mempunyai hasil yang berbeda dari jenjang sebelumnya, karena mengalami kenaikan, yaitu menyentuh angka dari 78.02 menjadi 80,89. Lalu untuk angka rata- rata lama sekolah Indonesia adalah 7,73 tahun di tahun 2014 kemudian naik menjadi 7,84 tahun di tahun 2015, ini berarti naik 0,11 tahun dari tahun sebelumnya, (Tempo.com). Selain itu dapat dilihat APK SD, SMP, dan SMA dari tahun 2015 hingga 2017 di Provinsi Jawa Barat dimana APK SD dan SMP mengalami penurunan pertahunnya, yaitu APK SD dari 109.42 di tahun 2015, menjadi 107.54 di tahun 2017, lalu APK SMP Jawa barat di tahun 2015 90.07 menurun menjadi 88.8 di tahun 2017, sedangkan APK SMA Provinsi Jawa Barat sendiri mengalami peningkatan dari 70.23 di tahun 2015 lalu meningkat menjadi

Irza Adya Sugardha, 2018

MANAJEMEN STRATEGIS WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

76.48 di tahun 2017 Selain APK (angka partisipasi kasar) di atas tadi, di bawah ini juga terdapat pemaparan APM (angka partisipasi murni) Nasional yang berasal dari 34 Provinsi dari tahun 2015 sampai tahun 2017.

Tabel 1.2. APM (Angka Partisipasi Murni) Nasional Berdasar Provinsi Tahun 2015- 2017

Provinsi	2015			2016			2017		
	Angka Partisipasi Murni (A P M)			Angka Partisipasi Murni (A P M)			Angka Partisipasi Murni (A P M)		
	SD/MI/ Paket A	SMP/ Mts/ Paket B	SM/ SMK/ MA/ Paket C	SD/ MI/ Paket A	SMP/ Mts/ Paket B	SM/ SMK/ MA/ Paket C	SD/ MI/ Paket A	SMP/ Mts/ Paket B	SM/ SMK/ MA/ Paket C
ACEH	97.99	85.55	69.82	98.16	85.73	70	98.54	86.31	70.15
SUMATERA UTARA	96.47	78.48	66.69	96.57	78.71	66.85	97.22	79.12	67.05
SUMATERA BARAT	98.12	76	66.9	98.23	76.19	67.12	98.64	76.47	67.3
RIAU	96.63	78.22	62.6	96.74	78.53	62.76	97.08	78.87	63.02
JAMBI	97.68	77.94	59.41	97.81	78.09	59.52	98.41	78.57	59.98
SUMATERA SELATAN	96.41	76.18	58.27	96.59	76.43	58.59	97.16	76.89	59.06
BENGKULU	98.1	76.88	64.97	98.22	77.02	65.29	98.6	77.85	65.33
LAMPUNG	98.32	78.2	58.39	98.46	78.34	58.85	99.02	79.24	58.97
KEP. BANGKA BELITUNG	96.66	72.42	57.02	96.75	72.75	57.22	97.42	73.06	57.69
KEP. RIAU	98.68	83.77	71.23	98.83	84.06	71.58	98.93	84.28	71.98
DKI JAKARTA	96.91	80.2	59.04	97.01	80.35	59.3	97.64	80.72	59.54
JAWA BARAT	97.68	79.55	56.73	97.82	79.76	56.92	98.05	80.29	57.22
JAWA TENGAH	96.57	78.66	58.27	96.64	78.89	58.49	97.13	79.13	59.2
DI YOGYAKARTA	99.23	82.86	68.6	99.21	83.05	68.96	99.29	83.25	69.66

JAWA TIMUR	97.38	81.16	60.31	97.49	81.35	60.76	97.77	81.52	61.49
BANTEN	96.98	79.84	57.04	97.22	79.93	57.21	97.56	80.59	57.88
BALI	95.64	84.78	71.53	95.75	84.99	71.71	96.09	85.32	72.4
NUSA TENGGARA BARAT	97.8	82.83	64.97	97.9	83.17	65.19	98.13	83.57	65.67
NUSA TENGGARA TIMUR	94.95	66.32	52.51	95.24	66.56	52.87	95.4	67.16	53.32
KALIMANTAN BARAT	96.09	64.55	50.32	96.22	64.69	50.43	96.59	65.19	50.96
KALIMANTAN TENGAH	98.54	75.76	52.36	98.67	75.92	52.5	98.94	76.14	53.86
KALIMANTAN SELATAN	97.75	72.51	55.58	98.05	72.7	55.91	98.45	73.37	57.15
KALIMANTAN TIMUR	97	79.06	67.78	97.13	79.2	67.92	97.43	79.58	68.23
KALIMANTAN UTARA	91.83	77.25	62.34	92.18	77.46	62.8	92.46	77.66	63.15
SULAWESI UTARA	93.97	73.02	62.23	94.12	73.15	62.5	94.46	73.87	62.81
SULAWESI TENGAH	92.35	71.1	63.32	92.48	71.25	63.61	92.75	72.25	63.8
SULAWESI SELATAN	96.84	73.51	59.47	96.99	73.67	59.62	97.49	74.36	59.86
SULAWESI TENGGARA	96.15	75.43	62.23	96.27	75.54	62.63	96.62	76.49	62.71
GORONTALO	97.09	68.71	56.24	97.23	68.89	56.37	97.54	69.15	56.82
SULAWESI BARAT	95.29	68.92	56.78	95.41	69.1	57.08	95.51	69.4	57.46
MALUKU	94.34	73.29	63.07	94.5	73.4	63.49	95.5	73.99	63.65
MALUKU UTARA	96.65	75.38	63.2	96.75	75.68	63.47	97.01	76.26	63.52
PAPUA BARAT	92.9	68.29	62.4	93.06	68.58	62.62	93.58	68.92	62.74
PAPUA	78.56	54.21	43.22	78.66	54.26	43.27	78.83	56.13	43.48
INDONESIA	96.7	77.82	59.71	96.82	77.95	59.95	97.19	78.4	60.37

(Sumber: Badan Pusat Statistik Pusat Tahun 2015-2017)

Kemudian berbeda dengan APK berdasarkan pada tabel diatas ,justru APM SD, SMP, dan SMA justru mengalami peningkatan dari tahun ketahun. APM SD Provinsi Jawa barat di tahun 2015 berada pada 97.68 meningkat menjadi 98.05 di tahun 2017, kemudian APM SMP dapat dilihat juga meningkat dari 79.55 di tahun 2015

Irza Adya Sugardha, 2018

MANAJEMEN STRATEGIS WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

meningkat menjadi 80.29 di tahun 2017, dan yang terahir APM SMA di tahun 2015 adalah 56.73 meningkat menjadi 57.22 di tahun 2017.

Terkait dengan permendikbud yang telah di uraikan diatas sebelumnya, di Jawa Barat sendiri sudah memulai program yang bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, salah satunya adalah melaksanakan Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang merupakan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun . Hal ini dilakukan agar setiap kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat dapat mempersiapkan diri ketika Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan tentang pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, yang harus dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia. Kemudian, dibawah ini dapat dilihat data yang berisi EYS (*Expected Years of School*) atau HLS (Harapan Lama Sekolah) dan MYS (*Mean Years of Schooling*) atau RLS (Rata-Rata Lama Sekolah) di Provinsi Jawa Barat di tahun 2015 hingga tahun 2016 .

Tabel 1.3. Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2016

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	EYS		MYS	
		2015	2016	2015	2016
1	Bogor	11.83	12.05	7.75	7.83
2	Sukabumi	12.13	12.18	6.51	6.74
3	Cianjur	11.83	11.88	6.54	6.61
4	Bandung	12.13	12.42	8.41	8.50
5	Garut	11.65	11.69	6.84	6.88
6	Tasikmalaya	12.44	12.46	6.88	6.94
7	Ciamis	13.59	13.65	7.45	7.55
8	Kuningan	12.03	12.04	7.20	7.34
9	Cirebon	11.79	12.03	6.32	6.41
10	Majalengka	11.74	11.89	6.80	6.89
11	Sumedang	12.90	12.91	7.66	7.72
12	Indramayu	12.09	12.20	5.46	5.56
13	Subang	11.46	11.66	6.45	6.58
14	Purwakarta	11.44	11.82	7.35	7.42
15	Karawang	11.69	11.85	6.81	6.94

Irza Adya Sugardha, 2018

MANAJEMEN STRATEGIS WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

16	Bekasi	11.93	12.23	8.66	8.81
17	Bandung Barat	11.39	11.56	7.53	7.63
18	Pangandaran	11.99	12.02	7.06	7.07
19	Kota Bogor	12.36	13.01	10.20	10.28
20	Kota Sukabumi	13.24	13.38	9.08	9.28
21	Kota Bandung	13.63	13.89	10.52	10.58
22	Kota Cirebon	12.94	13.07	9.76	9.87
23	Kota Bekasi	13.36	13.47	10.71	10.78
24	Kota Depok	13.54	13.86	10.71	10.76
25	Kota Cimahi	13.73	13.75	10.78	10.89
26	Kota Tasikmalaya	13.37	13.40	8.56	8.63
27	Kota Banjar	12.95	13.18	8.06	8.19
JAWA BARAT		12.15	12.3	7.86	7.95

(Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat Tahun 2015-2016)

Dari tabel diatas kita dapat mengetahui angka rata- rata lama sekolah di Provinsi Jawa barat dari tahun 2015 hingga tahun 2016, dimana angka rata-rata lama sekolahnya mengalami peningkatan dari 7.86 tahun menjadi 7.95 tahun. Selain dari angka Rata-Rata Lama Sekolah , Indikator pencapaian kearah Wajar 12 tahun juga bisa dilihat dari APK (Angka Partisipasi Kasar). Dibawah ini kita dapat melihat Angka Partisi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD, SMP, dan SMA di kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat saat ini Tahun 2016/ 2017, untuk mengetahui mengetahui pencapaian wajib belajarnya.

Tabel 1.4. APK(Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) SD,SMP, dan SMA Provinsi Jawa Barat Tahun 2016/2017

No	Kota/ Kabupaten	SD		SMP		SMA	
		APK	APM	APK	APM	APK	APM
1	Kab. Bogor	108,71	97,27	97,35	74,74	66,36	48,92
2	Kab. Sukabumi	106,27	96,74	96,10	75,03	64,24	50,26
3	Kab. Cianjur	103,90	94,64	98,72	77,09	62,15	48,17
4	Kab. Bandung	104,42	94,27	95,53	75,12	65,62	49,15
5	Kab. Sumedang	107,29	98,33	101,43	81,74	72,90	57,06
6	Kab. Garut	105,81	95,66	96,03	75,61	69,37	53,59

Irza Adya Sugardha, 2018

MANAJEMEN STRATEGIS WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

7	Kab. Tasikmalaya	105,49	97,76	98,02	79,91	64,97	53,19
8	Kab. Ciamis	106,66	98,57	99,51	80,98	68,81	56,09
9	Kab. Kuningan	106,41	97,39	99,55	79,47	85,96	66,02
10	Kab. Majalengka	105,37	97,18	100,40	79,58	74,24	56,60
11	Kab. Cirebon	109,31	96,28	97,18	74,81	72,90	52,54
12	Kab. Indramayu	104,13	92,75	96,26	73,41	77,63	58,15
13	Kab. Subang	106,05	95,63	110,19	85,26	86,66	65,25
14	Kab. Purwakarta	104,65	95,05	101,50	79,65	70,60	53,40
15	Kab. Karawang	106,12	95,49	98,68	75,52	74,20	54,36
16	Kab. Bekasi	107,06	97,27	96,76	71,90	82,40	59,50
17	Kab. Bandung Barat	99,49	90,24	98,89	78,71	69,88	53,51
18	Kab. Pangandaran	97,94	89,63	99,37	78,13	62,61	49,38
19	Kota Bandung	106,81	97,69	107,13	84,66	107,04	78,43
20	Kota Bogor	110,03	98,59	109,28	83,35	106,70	78,32
21	Kota Sukabumi	110,46	99,10	108,34	85,64	117,84	90,27
22	Kota Cirebon	107,54	94,73	108,41	81,93	105,07	78,65
23	Kota Bekasi	109,28	97,40	110,11	82,17	91,01	65,37
24	Kota Depok	104,66	95,35	109,12	84,21	93,01	66,19
25	Kota Cimahi	104,25	97,45	101,33	82,23	97,79	74,47
26	Kota Tasikmalaya	101,71	93,68	108,09	88,15	102,50	83,31
27	Kota Banjar	106,69	98,23	101,64	81,30	95,64	76,69

(Sumber : Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017)

Bila dilihat dari data diatas maka pencapaian APK SMA di kota dan kabupaten Jawa Barat yang paling baik adalah Pencapaian APK pada kota Sukabumi untuk jenjang sekolah menengahnya , dimana kota Sukabumi APK SMA nya telah mencapai lebih seratus persen, yaitu telah mencapai 117,84 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk kota Sukabumi sangat sadar akan pentingnya pendidikan , sehingga warganya berpartisipasi menyekolahkan anaknya hingga sekolah menengah. Sedangkan untuk pencapaian APK yang terendah di Jawa Barat untuk jenjang sekolah menengahnya adalah terdapat pada kabupaten Cianjur, yaitu sekitar 62,15 persen. Sedangkan APK rata- rata Provinsi Jawa Barat adalah 76.48 persen. Sehingga dapat diketahui bahwa ada sekitar 14 kota dan kabupaten di

Provinsi Jawa Barat yang pencapaian APK SMA nya masih di bawah rata- rata APK SMA Provinsi Jawa Barat.

Yang menjadi sorotan peneliti disini adalah salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat, yaitu KabupatenMajalengka. di Kabupaten Majalengka ini pencapaian APK sekolah menengahnya saat ini , sangat berbeda dengan APK SD dan SMP nya,lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.5. APK(Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) SD,SMP, dan SMA Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Tahun 2015/2016

SD/ MI		SLTP/ MTS		SMA/ MA	
APK	APM	APK	APM	APK	APM
109,01	96,35	100,36	82,54	63,44	43,20

(Sumber : Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016)

Tabel 1.6. APK dan APM SD,SMP, dan SMA Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Tahun 2016/2017

SD/ MI		SLTP/ MTS		SMA/ MA	
APK	APM	APK	APM	APK	APM
105,37	97,18	100,40	79,58	74,24	56,60

(Sumber : Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017)

Tabel diatas terdapat terdapat data yang berisi APK dan APM dari SD sampai SMA dari tahun 2015/ 2016 hingga 2016/ 2017 di Kabupaten Majalengka. Isi dari tabel tersebut kita dapat melihat APK SD di tahun 2015/ 2016 mengalami penurunan dari 109,01 menjadi 105,37 di tahun 2016/ 2017, lalu pada jenjang SMP mengalami peningkatan dari 100,36 pada tahun 2015/ 2016 menjadi 100,40 di tahun 2016/ 2017 berbeda dengan jenjang sebelumnya, dan yang terakhir pada tingkat SMA Angka Partisipasi Kasar mengaklami peningkatan yang signifikan yaitu dari 63,44

Irza Adya Sugardha, 2018

MANAJEMEN STRATEGIS WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

di tahun 2015/ 2016 menjadi 74,24 di tahun 2016/ 2017. Selain APK, tabel diatas juga menunjukkan APM Sekolah di Kabupaten Majalengka, dimana APM SD di Kabupaten Majalengka pada tahun 2015/ 2016 sekitar 96,35 meningkat menjadi 97,18 di tahun 2016/ 2017, sedangkan APM SMP mengalami penurunan dari 82,54 di tahun 2015/ 2016 menjadi 79,58 pada tahun 2016/ 2017, dan yang terakhir APM SMA di Kabupaten Majalengka juga mengalami peningkatan dari 43,20 di tahun 2015/ 2016 menjadi 56,60 di tahun 2016/ 2017. Bila dilihat dari perkembangan APK dan APM SD, SMP, hingga SMA di Kabupaten Majalengka, maka peluang yang dimiliki dalam melaksanakan dan pencapaian wajib belajar 12 Tahun di daerah ini juga semakin besar , apalagi bila dilihat dari pencapaian APK dan APM jenjang pendidikan dasarnya sudah mencapai 100 persen , sangat berbeda dengan pencapaian APK sekolah menengahnya , meski mengalami peningkatan setiap tahunnya tetapi hasilnya masih di bawah rata-rata APK sekolah menengah Provinsi Jawa Barat, yaitu sekitar 74,24 persen..

Di Kabupaten Majalengka pun saat ini sedang berusaha untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah di setiap jenjangnya, dengan membuat program- program yang mendukung pencapaian pendidikan 12 tahun, diantara beberapa programnya adalah pembentukan TAWAS (Tim Akselerasi Wajib belajar 12 Tahun) , yang terbentuk setahun lalu. Tim Akselerasi Wajib Belajar 12 Tahun bertugas untuk mencari dan mendata penduduk yang tidak sekolah dan putus sekolah, kemudian disalurkan ke PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Mengajar) setempat. Selain Pembentukan tim tadi, pemerintah daerah juga sempat menggratiskan sekolah dari SD sampai dengan SMA. Maka dari itu saya sebagai peneliti akan meneliti tentang manajemen strategis kearah wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Majalengka dikarenakan beberapa alasan.Pertama, APK sekolah menengah di Kabupaten Majalengka masih di bawah rata-rata APK sekolah menengah Provinsi Jawa Barat. Kedua, wajib belajar 12 tahun merupakan salah satu target ketercapaian RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ketiga, di Kabupaten Majalengka akan terdapat

Irza Adya Sugardha, 2018

MANAJEMEN STRATEGIS WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Bandara Internasional Jawa Barat atau Bandara Kertajati yang diperkirakan selesai kurang lebih 1 tahun lagi atau tahun 2018 , yang membutuhkan banyaknya SDM dalam bandara tersebut, sekiranya bandar udara yang mempunyai ukuran tersbesar kedua setelah bandara Soekarno Hatta ini, mempunyai kebutuhan 70 persen dari 100 persen tenaga kerja asal Majalengka. Alasan yang terakhir adalah dengan diberlakukannya MEA, yang diberlakukannya tahun 2015, mendorong terjadinya persaingan antar negara di Asia Tenggara, agar disetiap kota dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang diharapkan mempunyai kontribusi terhadap bangsa.

Sejumlah hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan manajemen strategis telah berhasil dalam memberikan kontribusinya, salah satunya adalah bahwa manajemen strategis telah berhasil dalam mencapai visi dan misi SMPN 2 Mataram dalam membentuk manusia yang berkualitas, hal ini merujuk kepada pendidikan karakter (Irawan ,dkk , 2014). Sebagaimana dalam penelitian lain disebutkan bahwa manajemen strategis juga telah menjadi *tools* dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Spanyol (Latorre & Blanco, 2013).

Dengan dilakukannya penelitian tentang strategi wajib belajar 12 tahun ini peneliti berharap dapat memberikan kontribusi pada dunia pendidikan dalam pelayanan pendidikan yang maksimal khususnya di Kabupaten Majalengka Jawa Barat . Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini penulis menetapkan judul “Manajemen Strategis Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat ”. Penelitian ini terfokus pada sekolah formal , berupa sekolah reguler dan Madrasah yang ada di Kabupaten Majalengka

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas , bahwa identifikasi dari permasalahan dalam penelitian ini, adalah “ Bagaimana strategi untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar hingga sekolah menengah untuk mempercepat ketercapaian wajib belajar 12 tahun di Majalengka dalam rangka menghasilkan SDM

Irza Adya Sugardha, 2018

MANAJEMEN STRATEGIS WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

yang berkualitas dan memenuhi kualifikasi untuk siap bekerja dengan minimal pendidikan sekolah menengah.”

1.3 Rumusan Masalah

Manajemen strategis wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Majalengka, dilatarbelakangi oleh rendahnya pencapaian APK sekolah menengahnya, dimana hasil pencapaiannya sangat berbeda dengan hasil pencapaian APK pendidikan dasar yang mencapai seratus persen. Untuk pencapaian APK sekolah menengahnya masih di bawah rata-rata, hal ini berarti banyak anak yang tidak sekolah atau putus sekolah di jenjang sekolah menengah, mengingat saat ini sudah diberlakukan MEA, yang diiinginkan setiap daerah di Indonesia dapat menghasilkan sumber daya manusia yang dapat berkontribusi terhadap bangsa atas persaingan global saat ini. Selain itu juga di Kabupaten Majalengka saat ini akan beroperasi bandara internasional yang dipastikan membutuhkan sumber daya manusia dari daerah tersebut.

Dari permasalahan yang telah dipaparkan tersebut, ditarik sebuah pertanyaan yang menjadi acuan dan dasar penelitian penelitian ini yaitu” Bagaimana strategi dalam mewujudkan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Majalengka?” sebagai upaya dalam pertanyaan tersebut, disusunlah sub pertanyaan yang terdiri bagaimana manajemen strategis wajib belajar di Kabupaten Majalengka ? dan bagaimana analisis lingkungan internal dan eksternal program wajib belajar di Kabupaten Majalengka ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk “ Merumuskan setrategi dalam mewujudkan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Majalengka”. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui program wajib belajar yang belaku di Kabupaten Majalengka dan juga untuk menganalisis faktor internal dan ekstrenal yang mempengaruhi pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat memenuhi empat criteria, yaitu aspek teori, kebijakan , praktik , isu dan aksi sosial, sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi yang berdaya guna secara teoritis, metodologis dan empiris bagi kepentingan akademisi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang administrasi pendidikan terutama tentang perencanaan pendidikan.
- b. Sebagai referensi keilmuan dalam bidang ilmu pendidikan khususnya administrasi pendidikan.
- c. Dapat dijadikan suatu pola dan strategi dalam perencanaan pendidikan setempat.

2. Aspek Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Sebagai informasi bagi para pengelola pendidikan dalam upaya memperbaiki, meningkatkan dan mengembangkan mutu pendidikan di Kabupaten Majalengka.
- b. Sebagai informasi bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Dinas Provinsi Jawa Barat, dan Kemenag Kabupaten Majalengka dalam upaya pencapaian wajib belajar pendidikan 12 tahun melalui perencanaan pendidikan.
- c. Dapat dijadikan bahan rujukan dan kajian pada penelitian selanjutnya.

3. Aspek Kebijakan

Dalam aspek kebijakan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai *tools* untuk menyusun kebijakan dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Majalengka, karena penelitian ini dibuat untuk mendapatkan strategi yang cocok dengan kondisi yang dimiliki Kabupaten Majalengka dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun.

4. Aspek Isu dan Aksi Sosial:

Dalam aspek isu dan aksi sosial, penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan arahan dalam mengatasi isu-isu strategis tentang pendidikan, terutama

Irza Adya Sugardha, 2018

MANAJEMEN STRATEGIS WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kesadaran masyarakat mengenai wajib belajar 12 tahun.

Irza Adya Sugardha, 2018

MANAJEMEN STRATEGIS WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu